



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN  
AKHIR RENCANA KERJA  
TAHUN 2026**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA DENPASAR**



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

9. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

### Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala atas pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota setiap triwulan melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 September 2025

WALIKOTA DENPASAR,  
  
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 2 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,  
  
IDA BAGUS ALIT WIRADANA  
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA DENPASAR TAHUN 2026

1. RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
2. RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
3. RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2026
4. RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
5. RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
6. RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
7. RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
8. RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2026
9. RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2026
10. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
11. RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
12. RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2026
13. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
14. RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
15. RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2026
16. RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
17. RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2026
18. RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
19. RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
20. RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
21. RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
22. RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
23. RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
24. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
25. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2026

26. RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
27. RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
28. RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
29. RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
30. RENCANA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
31. RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2026
32. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2026
33. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2026
34. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
35. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
36. RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2026

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,  
  
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA





WALIKOTA DENPASAR  
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 100.3.3.3/2048/HK/2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2026

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Denpasar sebagai Dokumen Perencanaan Periode 1 (satu) Tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Denpasar;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
  5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota

- Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
  7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
  8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:
- a. menyusun Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Denpasar agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan politik Kota Denpasar Tahun 2026;
  - b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. menyusun dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Denpasar Tahun 2026;
  - d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Denpasar Tahun 2026 dan;
  - e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Denpasar.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Nopember 2024

a.n. Walikota Denpasar

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kota Denpasar,



A.A. Ngurah Gede Darma Putra  
Atmadja, SE.

Pembina Tk. I

NIP. 19720313 199603 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar  
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar  
3. Inspektur Kota Denpasar  
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar  
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar  
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar  
7. Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar  
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 28 NOPEMBER 2024  
NOMOR : 100.3.3.3/2048/HK/2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA  
DENPASAR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2026

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar  
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
- Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
- Anggota : 1. Kepala Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar  
2. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar  
3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar  
4. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar  
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar  
6. Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar  
7. Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar  
8. Analis Perencana Ahli Pertama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

9. Analisis Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

a.n Walikota Denpasar

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Denpasar,



A.A Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, SE.

Pembina Tk. I

NIP. 19720313 199603 1 002

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN  
AKHIR RENCANA KERJA  
TAHUN 2026**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA DENPASAR**

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa maka penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai melalui Program dan Kegiatan di Tahun 2026. Saran-saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terimakasih.

Denpasar, 2 September 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Denpasar,



**A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, SE.**

Pembina Tk. I

NIP. 19720313 199603 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan sesungguhnya merupakan suatu jembatan yang harus dilalui didalam mewujudkan pembangunan yang ingin dicapai atau dicita-citakan. Oleh sebab itu, maka penyelenggara/pelaksana pembangunan juga harus patuh terhadap rencana-rencana yang telah ditentukan dan ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya sehingga kualitas hasilnya dapat dijamin. Sistem perencanaan pembangunan nasional dikatakan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.

Terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

1. Penyusunan rencana adalah menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang sifatnya teknokratik, menyeluruh dan terukur dari masing-masing instansi pemerintah (Perangkat Daerah) dengan melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
2. Penetapan rencana dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang merupakan produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.
3. Pengendalian pelaksanaan rencana yaitu pelaksanaan perencanaan dilakukan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana.
4. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan, yang dilaksanakan berdasarkan indikator dan

sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan, meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Sebagai unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah semua Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Denpasar wajib mengikuti tahapan-tahapan perencanaan pembangunan tersebut didalam mewujudkan RPJM Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 dan RPJP Daerah Kota Denpasar tahun 2005–2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar No.1 Tahun 2009. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar memiliki tugas membantu Walikota Denpasar dalam menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk membantu tugas Walikota Denpasar tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar berada di Misi kedua yaitu Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.

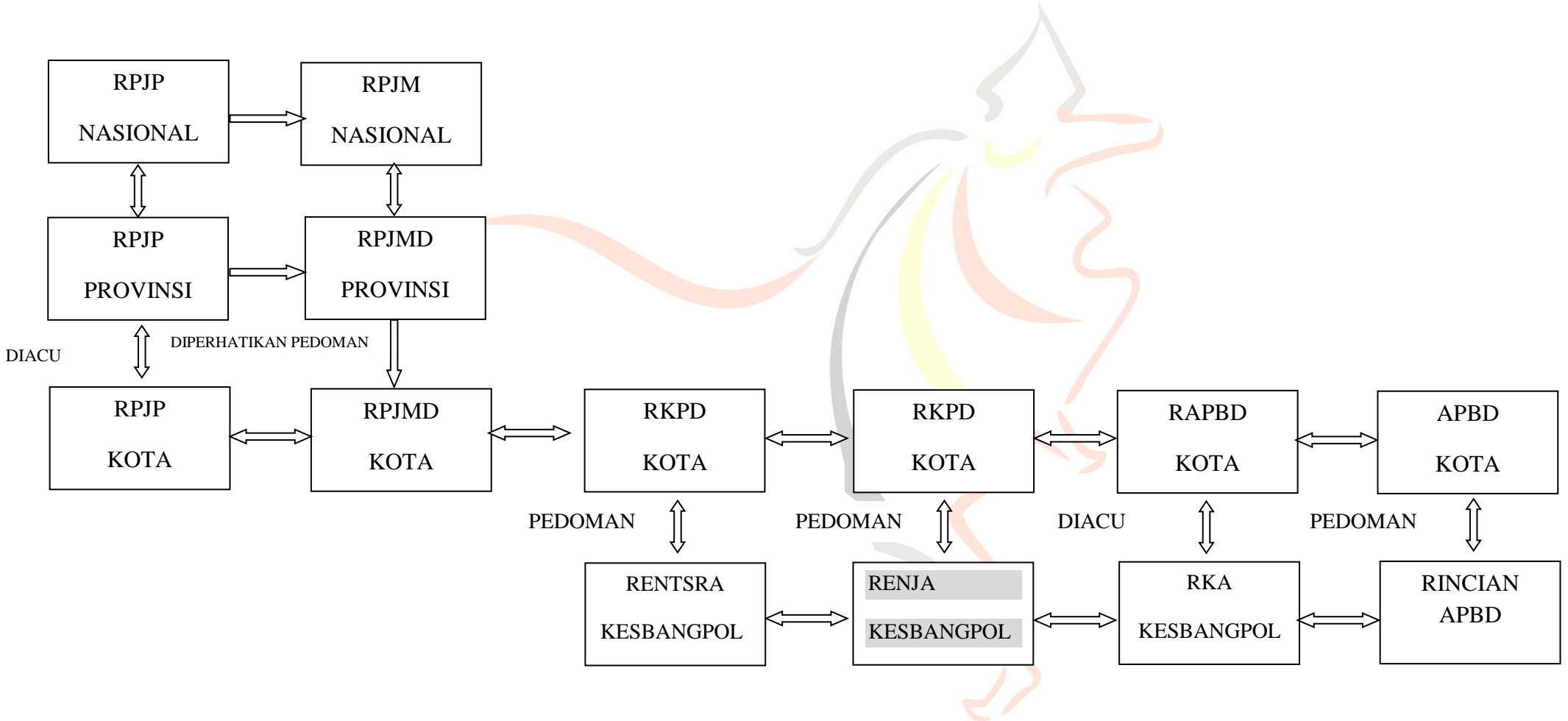
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dokumen perencanaan yang harus disusun dan ditetapkan setiap daerah (kabupaten/kota) adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan juga diamanatkan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, di mana dalam proses penyusunannya berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJMD. Sebagai informasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2026, baru sebatas rancangan rencana kerja, sehingga rancangan Renja ini dalam perjalanannya masih sangat dimungkinkan terjadi perubahan atau koreksi.

Keterkaitan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dengan dokumen perencanaan lainnya, mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah seperti dalam gambar di bawah ini :



GAMBAR 1.1  
HUBUNGAN RENJA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
  15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005–2026;

16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56);
20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026, sedangkan tujuannya adalah merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar selama tahun 2026.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar disusun berdasarkan tata urutan yang telah ditentukan

dan ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

1.4.1 Bab I Pendahuluan terdiri dari :

- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

1.4.2 Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, terdiri dari :

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.4.3 Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Program dan Kegiatan

1.4.4 Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

1.4.5 Bab V Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Renja Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi Renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga akhir tahun 2024. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan yaitu secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 sudah dilaksanakan.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024 dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dan sudah tercapai 100%.

- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan yaitu pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan target sudah dapat dipenuhi.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan :
- Pada dasarnya semua program/kegiatan sudah mencapai target kinerja sesuai dengan apa yang ditargetkan. Namun, dalam pelaksanaannya realisasi keuangan program/kegiatan tidak bisa mencapai 100%. Hal ini disebabkan terdapat belanja modal yang tidak dapat direalisasi dikarenakan terkendala barang yang masih impor dan juga belanja untuk kegiatan penyelenggaraan pelantikan DPPI Kota Denpasar, belanja perjalanan dinas untuk kegiatan DPPI ke BPIP Pusat, dan honor untuk paskibraka yang sebagian kecil tidak terealisasi.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah adalah: apabila target capaian program Renja Perangkat Daerah bisa terpenuhi setiap tahun anggaran, maka Perangkat Daerah yang bersangkutan bisa pula mengembangkan usulan program/kegiatan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan visi dan misi serta tupoksi Perangkat Daerah.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah: bahwa pimpinan (Kepala Perangkat Daerah) harus mampu mengakomodir unsur-unsur pimpinan secara struktural termasuk staf dengan meningkatkan koordinasi didalam merancang usulan program/kegiatan sehingga tercipta suasana kerjasama yang baik untuk mewujudkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas.





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	100%	18 unit	18 unit	100%
8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	84 unit	70 unit	70 unit	70 unit	100%	84 unit	70 unit	100%
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8	01	02			<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
8	01	02	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	750 orang	1560 orang	1560 orang	1560 orang	100%	750 orang	1560 orang	100%
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1060 orang	1300 orang	1300 orang	1300 orang	100%	1060 orang	1060 orang	100%
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	78 orang	-	-	-	-	78 orang	-	-
8	01	03			<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan</b>	<b>Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik</b>	<b>80%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					<b>PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>									
8	01	03	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	65 orang	-	-	-	-	65 orang	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		<b>Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>											
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
8	01	05	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	9
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase penurunan konflik sosial</b>	<b>90%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>
8	01	06	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	100%	35 orang	35 orang	100%
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing,	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	100%	35 orang	35 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Jika indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan, maka semua program pembangunan akan berjalan dengan lancar dan terealisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar memiliki program yang sangat penting dalam upaya menemukan jati diri masyarakat Kota Denpasar untuk menghadapi tantangan yang semakin berat karena derasnya pengaruh globalisasi. Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar berdasarkan target dan realisasi capaiannya, serta proyeksi capaian di tahun berjalan dan catatan analisisnya akan disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Denpasar

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik			70%	75%	75%	80%	80%	75%	75%	80%	80%	
4	Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif			67%	68%	69%	70%	70%	68%	69%	70%	70%	
5	Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase penurunan konflik sosial			60%	70%	80%	90%	95%	70%	80%	90%	95%	

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

- a. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, sejak menempati kantor yang representatif mengalami peningkatan yang signifikan karena masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat dilayani dengan optimal dan maksimal.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah: belum sesuainya *time schedule* terhadap pelaksanaan teknis di lapangan sehingga belum optimalnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Diharapkan kedepannya perlu dilaksanakan evaluasi agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan seoptimal mungkin.
- c. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) MDGs (*Millenium Development Goals*) adalah: akan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap program nasional atau internasional seperti SPM dan MDGs apabila permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tidak bisa diatasi atau diselesaikan.
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah:
  - Tantangannya adalah kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana perkantoran yang selalu harus mendapatkan perhatian pemerintah daerah (faktor internal). Faktor eksternalnya menyangkut masalah keamanan (Kamtibmas) daerah/regional maupun nasional.
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah: merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai unsur pemerintah daerah yang diberikan tugas menurut peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah merupakan acara dalam menyusun perumusan program dari kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.  
Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sebagai berikut:

- Tugas pokoknya, membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- Fungsinya adalah: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesatuan bangsa dan politik serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD**

- a. Proses yang dilakukan dalam membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisa kebutuhan adalah: hanya merupakan penyusunan program atau kegiatan dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan anggaran yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tahun 2024 sehingga menjadi rujukan tahun anggaran 2026.
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan adalah: karena Denpasar sebagai daerah yang terbuka dari berbagai interaksi, baik individu, kelompok, budaya kepentingan dan berbagai organisasi lainnya yang terkait dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta keamanan dan ketertiban. Hal ini disebabkan oleh kehidupan pariwisata di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi dapat menjadikan tingkat heterogenitas mengandung potensi konflik. Heterogenitas tersebut jika dikelola dengan baik dan terarah dapat menjadi potensi pembangunan, jika tidak akan dapat menimbulkan kerawanan sosial maupun politik yang mengarah kepada konflik sosial di masyarakat.
- c. Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan akhir RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarnya beda: apabila permasalahan tersebut memang ada, maka akan dikoordinasikan dengan instansi terkait cq. Bappeda untuk diadakan perbaikan atau disesuaikan sebagaimana mestinya.
- d. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar disusun dengan berpedoman kepada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dan mengacu kepada RKPD Kota Denpasar. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh

aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Tabel 2.3  
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026  
Kota Denpasar

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>22.128.351.404</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>22.128.351.404</b>	
	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>22.128.351.404</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>22.128.351.404</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>10.383.652.704</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>10.383.652.704</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>16.215.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>16.215.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	16.215.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	16.215.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>8.603.449.600</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>8.603.449.600</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 orang/bulan	8.603.449.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 orang/bulan	8.603.449.600	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya</b>	<b>100%</b>	<b>219.776.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya</b>	<b>100%</b>	<b>219.776.000</b>	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	1 paket	7.219.000	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	1 paket	7.219.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	86.926.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	86.926.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Denpasar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	18.233.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Denpasar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	18.233.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	13.670.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	13.670.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Denpasar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	5.208.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Denpasar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	5.208.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	7.200.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	7.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	81.320.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	81.320.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>404.808.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>404.808.000</b>	
	Pengadaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	16.530.000	Pengadaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	16.530.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	388.278.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	388.278.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>768.260.104</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>768.260.104</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	281.659.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	281.659.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	156.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	156.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	330.601.104	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	330.601.104	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>371.144.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>371.144.000</b>	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau lapangan	18 unit	221.688.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau lapangan	18 unit	221.688.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	4.765.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	4.765.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	83 unit	94.691.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	83 unit	94.691.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	50.000.000	
	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>5.852.126.000</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>5.852.126.000</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>5.852.126.000</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>5.852.126.000</b>	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Denpasar	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	750 orang	820.472.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Denpasar	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	750 orang	820.472.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Denpasar	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.100 orang	2.659.597.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Denpasar	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.100 orang	2.659.597.000	
	Pembentukan Paskibraka	Kota Denpasar	Jumlah Paskibraka	78 orang	2.372.057.000	Pembentukan Paskibraka	Kota Denpasar	Jumlah Paskibraka	78 orang	2.372.057.000	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik</b>	<b>80%</b>	<b>1.789.325.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik</b>	<b>80%</b>	<b>1.789.325.000</b>	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.789.325.000</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.789.325.000</b>	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Denpasar	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	1 dokumen	40.071.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Denpasar	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	1 dokumen	40.071.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Denpasar	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 orang	1.749.254.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Denpasar	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 orang	1.749.254.000	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif</b>	<b>70%</b>	<b>541.440.400</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif</b>	<b>70%</b>	<b>541.440.400</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan</b>	<b>100%</b>	<b>541.440.400</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan</b>	<b>100%</b>	<b>541.440.400</b>	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>					<b>dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Ormas Asing di Daerah	Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Ormas Asing di Daerah	1 laporan	541.440.400	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Ormas Asing di Daerah	Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Ormas Asing di Daerah	1 laporan	541.440.400	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi sosial dan budaya</b>	<b>100%</b>	<b>2.401.753.300</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi sosial dan budaya</b>	<b>100%</b>	<b>2.401.753.300</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>2.401.753.300</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>2.401.753.300</b>	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang	1 laporan	2.401.753.300	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang	1 laporan	2.401.753.300	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase penurunan konflik sosial</b>	<b>95%</b>	<b>1.160.054.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase penurunan konflik sosial</b>	<b>95%</b>	<b>1.160.054.000</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>1.160.054.000</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>1.160.054.000</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Kota Denpasar	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan	35 orang	215.730.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Kota Denpasar	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan	35 orang	215.730.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Denpasar	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40 orang	236.870.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Denpasar	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40 orang	236.870.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas	Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	1 laporan	287.130.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas	Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	1 laporan	287.130.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	420.324.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	420.324.000	
<b>TOTAL</b>					<b>22.128.351.404</b>	<b>TOTAL</b>					<b>22.128.351.404</b>

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dilihat dari hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan adalah: bahwa hasil pelaksanaan program dan kegiatan tidak sepenuhnya dapat direalisasikan, karena banyak kendala – kendala/ hambatan yang menjadi penyebabnya sehingga perlu di evaluasi pada musrenbang tahun berikutnya. Untuk kedepannya, Perangkat Daerah hendaknya selalu memperhatikan hal-hal yang menjadi penyebab/kendala tersebut. Selain itu, dari hasil pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan dimana dalam Tahun 2026 belum ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang masuk ke dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2026.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021–2026 memiliki 5 (lima) misi pembangunan yang kongkrit, dalam mewujudkan visinya yaitu:

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Permasalahan dan tantangan tersebut tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, membuat informasi tidak bisa disekat-sekat lagi oleh batas-batas teritorial suatu negara. Lebih-lebih Bali pada umumnya dan Denpasar pada khususnya merupakan tujuan pariwisata dunia yang tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh budaya luar baik yang positif maupun negatif untuk pembangunan. Untuk mengantisipasi agar supaya visi dan misi Kota Denpasar bisa terwujud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi: membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan membuat rumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya selalu memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini sudah tentu sesuai dengan bidang tugasnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Tahun 2026 merupakan tahun ke-5 (kelima) daripada pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Pemerintah Kota Denpasar periode 2021–2026. Sudah tentu dalam perjalanannya nanti, semua Perangkat Daerah akan berusaha mencapai tujuan dan sasaran Renjanya masing-masing. Terkait dengan hal tersebut tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar adalah tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tujuannya :

- Meningkatkan pengendalian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat

Sasarannya :

- Berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban
- Optimalnya upaya penanganan kriminalitas

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

I. Pencapaian visi dan misi kepala daerah sesungguhnya merupakan kewajiban yang diberikan kepada semua Perangkat Daerah dalam bentuk rancangan pembangunan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bagaimana Perangkat Daerah mengimplementasikan dan mengklasifikasikan atau strategi yang dipergunakan, tergantung kesungguhan aparatur Perangkat Daerah yang bersangkutan dan situasi dan kondisi di lapangan. Disamping itu, juga mempertimbangkan usulan anggaran program/kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

II. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di masing–masing Perangkat Daerah perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari pengambil kebijakan setiap tahunnya sehingga Perangkat Daerah yang dikategorikan pelayanannya belum/tidak maksimal bisa termotivasi meningkatkan kinerjanya.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi :

Tabel 3.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026  
dan Prakiraan Maju Tahun 2027  
Kota Denpasar

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>22.128.351.404</b>				<b>27.928.594.505</b>
8	<b>01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>22.128.351.404</b>				<b>27.928.594.505</b>
8	<b>01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>10.383.652.704</b>			<b>100%</b>	<b>12.236.343.755</b>
8	<b>01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>16.215.000</b>			<b>100%</b>	<b>17.836.500</b>
8	01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	1 dokumen	16.215.000			1 dokumen	17.836.500
8	<b>01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>8.603.449.600</b>				<b>9.572.055.570</b>
8	01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Denpasar	55 orang/bulan	8.603.449.600			55 orang/bulan	9.572.055.570
8	<b>01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>219.776.000</b>			<b>100%</b>	<b>303.135.470</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	Kota Denpasar	1 paket	7.219.000			1 paket	7.940.900
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Denpasar	1 paket	86.926.000			1 paket	95.618.600
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Denpasar	1 paket	18.233.000			1 paket	20.056.300
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Denpasar	1 paket	13.670.000			1 paket	18.236.570
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Denpasar	2 dokumen	5.208.000			2 dokumen	5.728.800
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kota Denpasar	1 laporan	7.200.000			1 laporan	7.920.000
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Denpasar	1 laporan	81.320.000			1 laporan	147.634.300
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>404.808.000</b>			<b>100%</b>	<b>445.288.800</b>
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Denpasar	10 unit	16.530.000			10 unit	18.183.000
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Denpasar	1 unit	388.278.000			1 unit	427.105.800
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>768.260.104</b>			<b>100%</b>	<b>1.489.769.015</b>

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		<b>Penunjang Usuran Pemerintah Daerah</b>										
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar	1 laporan	281.659.000		1 laporan	387.256.100
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Denpasar	1 laporan	156.000.000		1 laporan	171.600.000
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Denpasar	1 laporan	330.601.104		1 laporan	930.912.915
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>371.144.000</b>		<b>100%</b>	<b>408.258.400</b>
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Denpasar	18 unit	221.688.000		18 unit	243.856.800
8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kota Denpasar	5 unit	4.765.000		5 unit	5.241.500
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Denpasar	83 unit	94.691.000		83 unit	104.160.100
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Denpasar	1 unit	50.000.000		1 unit	55.000.000
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER</b>	<b>Persentase pemantapan pelaksanaan</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>5.852.126.000</b>		<b>100%</b>	<b>8.742.941.900</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	<b>KEBANGSAAN</b>	<b>penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>											
8	01	02	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>5.852.126.000</b>			<b>100%</b>	<b>8.742.941.900</b>
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Denpasar	750 orang	820.472.000			750 orang	1.232.519.200
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Denpasar	1.100 orang	2.659.597.000			1.100 orang	3.977.949.800
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kota Denpasar	78 orang	2.372.057.000			78 orang	3.532.472.900
8	01	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN</b>	<b>Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>80%</b>	<b>1.789.325.000</b>			<b>80%</b>	<b>2.001.789.900</b>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<b>POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>serta Budaya Politik</b>							
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Denpasar	100%	1.789.325.000			100%	2.001.789.900
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Denpasar	1 dokumen	40.071.000			1 dokumen	27.953.200
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan	Kota Denpasar	20 orang	1.749.254.000			20 orang	1.956.864.800

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
8	01	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>70%</b>	<b>541.440.400</b>			<b>70%</b>	<b>597.351.150</b>
8	01	04	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>541.440.400</b>			<b>100%</b>	<b>597.351.150</b>
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Ormas Asing di Daerah	Kota Denpasar	1 laporan	541.440.400			1 laporan	597.351.150

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>2.401.753.300</b>			<b>100%</b>	<b>2.414.315.200</b>
8	01	05	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>2.401.753.300</b>			<b>100%</b>	<b>2.414.315.200</b>
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Denpasar	1 laporan	2.401.753.300			1 laporan	2.414.315.200
8	01	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase penurunan konflik sosial</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>95%</b>	<b>1.160.054.000</b>			<b>95%</b>	<b>1.935.852.600</b>
8	01	06	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Keaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>1.160.054.000</b>			<b>100%</b>	<b>1.935.852.600</b>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<b>Pemantapan Keaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>							
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Denpasar	35 orang	215.730.000			35 orang	500.401.000
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Denpasar	40 orang	236.870.000			40 orang	655.712.200
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan	Kota Denpasar	1 laporan	287.130.000			1 laporan	316.613.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	1 dokumen	420.324.000			1 dokumen	463.126.400

- I. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Untuk penyebaran lokasi program dan kegiatan yang telah ditentukan oleh masing-masing bidang dalam setahun, pelaksanaannya dibagi per triwulan dan lokasi/tempat kegiatan ditentukan sesuai dengan situasi dan kondisi di wilayah Kota Denpasar.
- II. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan adalah: sebesar Rp 22.128.351.404,- (Dua puluh dua milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat rupiah). Kalau dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2025 maka tahun ini mengalami kenaikan Rp 1.394.255.722,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) atau 6,72% dari jumlah anggaran tahun 2025 Rp. 20.734.095.682,- (Dua puluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya adalah: hal ini sudah tentu akan dikoordinasikan oleh semua Perangkat Daerah ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar selaku leading sektor dalam menyusun penyiapan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2026.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu Perangkat Daerah mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya rencana kerja Perangkat Daerah, dalam hal ini pimpinan akan memahami skala prioritas dengan lebih baik. Rencana kerja juga dapat membantu aparatur dalam Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan dengan baik dan teratur, di samping itu rencana kerja yang tersusun dengan baik, akan menghasilkan pembagian tugas yang baik pula. Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun Rencana Kerja yang akan di lakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada Tahun 2026 oleh Sekretariat maupun Bidang yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Rencana Program / Kegiatan dan Pendanaan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2026

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>22.128.351.404</b>
	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			<b>22.128.351.404</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>10.383.652.704</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>16.215.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	16.215.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>8.603.449.600</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 orang/bulan	8.603.449.600
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>219.776.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	1 paket	7.219.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	86.926.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	18.233.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	13.670.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	5.208.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	7.200.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	81.320.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>404.808.000</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	16.530.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	388.278.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>768.260.104</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	281.659.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	156.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	330.601.104
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>371.144.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	18 unit	221.688.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	4.765.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	83 unit	94.691.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	50.000.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>5.852.126.000</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>5.852.126.000</b>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan	750 orang	820.472.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.100 orang	2.659.597.000
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	78 orang	2.372.057.000
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik</b>	<b>80%</b>	<b>1.789.325.000</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.789.325.000</b>
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 dokumen	40.071.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 orang	1.749.254.000
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif</b>	<b>70%</b>	<b>541.440.400</b>

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>541.440.400</b>
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Ormas Asing di Daerah	1 laporan	541.440.400
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Pembinaan dan pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>2.401.753.300</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>2.401.753.300</b>
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 laporan	2.401.753.300
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase penurunan Konflik Sosial</b>	<b>95%</b>	<b>1.160.054.000</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>1.160.054.000</b>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 orang	215.730.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang	40 orang	236.870.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 laporan	287.130.000
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	420.324.000
<b>TOTAL</b>				<b>22.128.351.404</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Catatan penting yang juga mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan adalah apabila hal tersebut memang terjadi, maka semua Perangkat Daerah pada umumnya perlu hati-hati dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) untuk masing-masing program/kegiatan.

Unsur-unsur yang ada di Perangkat Daerah hendaknya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi serta meningkatkan kebersamaan di dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan tugas-tugas Perangkat Daerah yang bersangkutan. Rancangan akhir Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar melaksanakan 6 (enam) Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.128.351.404,-

Meskipun demikian, Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dan instansi-instansi terkait semestinya tetap berupaya melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan, namun selalu waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah bisa tercapai. Kaedah-kaedah pelaksanaannya adalah sudah tentu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukumnya dan mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Mengenai rencana tindak lanjut dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar selaku Perangkat Daerah apabila dalam merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan mengalami hambatan-hambatan atau kegagalan, maka akan dievaluasi dan dikaji serta dikoordinasikan, baik kedalam (internal) maupun keluar (eksternal) untuk mengetahui dimana letak kekurangannya.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tahun 2026, yang sudah tentu jauh dari sempurna sehingga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaannya di masa yang akan datang.

Denpasar, 2 September 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Denpasar,



A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, SE.

Pembina Tk. I

NIP. 19720313 199603 1 002



ပိဗ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈ

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

တႆးႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈ

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

တႆးႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈ

Jl. Beliton No. 1 Denpasar Kode Pos 80112, Telepon (0361) 234648 Fax 234648

Laman : [www.kesbangpol.denpasarkota.go.id](http://www.kesbangpol.denpasarkota.go.id) Pos-el : [kesbangpoldps@gmail.com](mailto:kesbangpoldps@gmail.com)

**Formulir E.70**

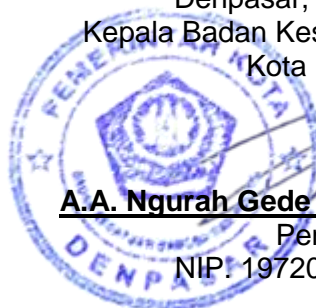
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2026**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan	√			

Denpasar, 2 September 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Denpasar,



**A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, SE**

Pembina Tk. I

NIP: 19720313 199603 1 002